

# PENYELENGGARAAN PERTANIAN LAHAN PANTAI DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*The Coastal Land Agriculture And Its Impact On Environment In Yogyakarta Special Region Province*

F. Romana Harjiyatni<sup>1</sup> dan Koesnadi Hardjasoemantri<sup>2</sup>

*Program Studi Ilmu Hukum*

*Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

## ABSTRACT

Increasing number of agricultural land with function shifted into different sector other than agriculture has created its expansion to marginal land, i.e. coastal land. Coastal land are area susceptible to changes due to specific activities in that area. Therefore, coastal land exploitation for agricultural activities should be carried out in such a way that its exploitation do not damage coastal land environment.

Results of the research indicate that efforts on establishing environmental-oriented sustainable agriculture had been already conducted, but it had not been maximal yet due to various impediments. Effort that government made was to set up reservation and cultivation areas within Regional Spatial Plan and Detailed Spatial Plan for South Coastal Area. The Regional Spatial Plan and Detailed Spatial Plan for South Coastal Area, however, did not confirm whether agricultural activities were allowed to be conducted in reservation area of coastal border. On the other hand, the community had not received sufficient knowledge on reservation and cultivation available in coastal area. In addition, government also issued policy on environmental-friendly irrigation system. However, it had not been maximally implemented yet due to limited fund.

Positive impact on environment is increasing reforestation in coastal area. Negative impact imposed is the possibility of sea-water intrusion into land due to excessive ground water exploitation. Positive impact on public social condition is additional alternative income and more greater communality and higher mutual cooperation among peasants. Its negative impact is uncontrolled parceling of land.

Agricultural implementation on coastal land, on one hand, supported Sustainable Coast Program in Yogyakarta Special Region Province in term of reforestation along coastal area. On the other hand, no deeper study was conducted viewed based on environmental aspect, especially in term of impact aspect.

**Keywords:** *coastal land agriculture -- environmental impact*

1 Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta.

2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## PENGANTAR

Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang (Koesnadi Hardjasoemantri, 1999: 53). Pelaksanaan pembangunan yang demikian disebut dengan "pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan". Dalam bidang pertanian pun harus terwujud pembangunan pertanian berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Berkembangnya usaha pada sektor industri dan jasa, menyebabkan banyak lahan pertanian beralih fungsi untuk keperluan sektor di luar pertanian, sedangkan di sisi lain produksi pertanian harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk dan industri yang semakin meningkat pula (Eni Istiyanti, 1999: 1-2).

Mengingat permasalahan tersebut di atas, salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah perluasan areal pertanian ke arah lahan marginal. Salah satu lahan marginal yang mempunyai potensi dikembangkan untuk pertanian yaitu lahan pantai. Lahan pantai pada umumnya merupakan lahan kosong. Usaha pemerintah dalam mengatasi krisis pangan agar dapat terlaksana, maka pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan pemanfaatan tanah (lahan) kosong. Kebijakan pemerintah ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) No. 3 Tahun 1998 tentang Kewajiban Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan (Erna Sri Wibawanti, 2000: 6-7).

Di satu sisi, lahan pantai yang kosong lebih bermanfaat apabila digunakan oleh masyarakat termasuk salah satunya untuk kegiatan pertanian daripada dibiarkan tidak terurus. Tetapi di sisi lain, kawasan pantai merupakan kawasan yang rentan terhadap perubahan-perubahan akibat dilakukannya kegiatan-kegiatan tertentu di lahan pantai termasuk dalam hal ini untuk kegiatan pertanian. Untuk itu, dalam upaya memberikan perlindungan kelestarian pantai, setiap kegiatan termasuk pertanian harus memperhatikan kebijakan di bidang tata ruang, kawasan lindung, dan Program Pantai Lestari.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam Program Pantai Lestari dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan hidup Nomor : KEP-56/MENLH/12/1997 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-47/MENLH/11/1996 Tentang Penetapan Prioritas Propinsi Daerah Tingkat I Program Pantai Lestari.

Pemanfaatan lahan pantai untuk pertanian secara berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berarti melaksanakan tujuan Program Pantai Lestari seperti yang diatur dalam SK MENLH Nomor : KEP-45/MENLH/11/1996.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam rangka membahas pertanian lahan pantai dan dampaknya terhadap lingkungan dianalisis permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya dalam menciptakan pertanian berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam penyelenggaraan pertanian lahan pantai di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
- b. Dampak apa saja yang timbul terhadap lingkungan kawasan pantai akibat pemanfaatan lahan pantai untuk usaha pertanian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
- c. Bagaimana penyelenggaraan pertanian lahan pantai di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikaitkan dengan Program Pantai Lestari?

## CARA PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Propinsi Daerah Istimewa memiliki 4 (empat) wilayah kabupaten dan 1 (satu) kota. Yang mempunyai wilayah lahan pantai hanya 3 (tiga) kabupaten yang meliputi Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Untuk memperoleh data mengenai penyelenggaraan pertanian lahan pantai dan dampaknya terhadap lingkungan, diambil desa-desa yang di dalam wilayahnya mempunyai lahan pantai yang dimanfaatkan untuk pertanian tanaman pangan. Dari tiap-tiap desa diambil dusun-dusun yang memiliki lahan pantai yang paling dekat perairan air laut, berdasarkan masukan dari narasumber baik dari Dinas Pertanian maupun dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat di kawasan pantai yang memanfaatkan lahan pantai untuk pertanian (petani) di dusun-dusun yang letaknya paling dekat dengan pantai. Untuk Kabupaten Kulon Progo terdapat 15 dusun, dan masing-masing dusun diambil 10% dari keseluruhan petani yang menggarap lahan pantai untuk pertanian secara *nonrandom*, sehingga jumlah seluruhnya ada 125 orang petani. Kabupaten Bantul terdapat 11 dusun, dan masing-masing diambil 10% dari keseluruhan petani yang menggarap lahan pantai untuk pertanian secara *nonrandom*, sehingga jumlah seluruhnya ada 100 orang petani. Kabupaten Gunung Kidul terdapat 9 dusun, dan masing-masing diambil 10% dari keseluruhan petani yang menggarap lahan pertanian

secara *nonrandom*, sehingga jumlah seluruhnya ada 65 orang petani.

Untuk mendukung dan melengkapi data yang diperoleh dari responden, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang dijadikan narasumber, yaitu Pejabat Dinas Pertanian Propinsi DIY, Pejabat Sub Dinas Pengairan Propinsi DIY, Pejabat BAPEDALDA Propinsi DIY, Pejabat BAPPEDA Propinsi DIY, Pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Bantul, Pejabat Bapedal Kabupaten Bantul, Pejabat BAPPEDA Kabupaten Bantul, Pejabat Dinas Pengairan Kabupaten Bantul, Pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo, Pejabat Kapedal Kabupaten Kulon Progo, Pejabat BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, Pejabat Sub Dinas Pengairan Kabupaten Kulon Progo, Pejabat BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul, Para Kepala Dusun dari desa terkait.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada responden. Pengumpulan data dari narasumber dilakukan dengan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat. Data sekunder dikumpulkan dengan melalui penelitian kepustakaan, yaitu mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, laporan, surat kabar, dan bahan hukum tersier yang meliputi kamus dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

Data primer yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan untuk kemudian diedit, dan data yang berupa angka ditabulasi dengan menggunakan tabel-tabel guna memudahkan dalam analisisnya, sedangkan data sekunder dihimpun dan dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan didukung data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Menciptakan Pertanian Lahan Pantai Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Propinsi DIY.**

Upaya pemerintah daerah adalah menetapkan kebijakan mengenai pemanfaatan lahan pantai yang dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai Selatan (RDTRK). RTRW maupun dalam RDTRK tidak memberikan kejelasan apakah kegiatan pertanian lahan pantai boleh dilakukan di kawasan sempadan pantai atau tidak. Ketidakjelasan ini menyebabkan pejabat pemerintah tidak mempunyai sikap dan tindakan yang tegas terhadap masyarakat yang

melakukan kegiatan pertanian di kawasan sempadan pantai. Di lain pihak masyarakat sendiri kurang mengetahui mengenai kawasan lindung dan kawasan budidaya yang ada di wilayah pantai.

Berdasarkan data dari responden petani sebanyak 125 orang di Kabupaten Kulon Progo, ada 30 orang petani (24%) melaksanakan pertanian yang sebagian lokasinya ada di wilayah sempadan pantai. Dari responden petani sebanyak 100 orang di Kabupaten Bantul, ada 57 orang (57%) melaksanakan pertanian yang sebagian lokasinya ada di wilayah sempadan pantai. Dari responden petani sebanyak 65 orang di kabupaten Gunungkidul, ada 42 orang (64,6%) melaksanakan pertanian yang sebagian lokasinya ada di wilayah sempadan pantai.

Upaya lain yang dilakukan adalah mengembangkan sistem irigasi yang ramah lingkungan yaitu penyediaan air dengan model embung/reservoir yang disedot dari sungai atau saluran drainase. Model ini bisa mencegah terjadinya intrusi air laut, tetapi model ini belum bisa menjangkau seluruh kawasan pertanian lahan pantai karena keterbatasan dana. Berdasarkan data dari responden petani sebanyak 125 orang di Kabupaten Kulon Progo, ada 113 orang petani (90,4%) yang memanfaatkan sumur tanah untuk mengairi lahan pertanian. Dari responden petani sebanyak 100 orang di Kabupaten Bantul, ada 50 orang petani (50%) yang memanfaatkan sumur tanah untuk mengairi lahan pertanian. Untuk Kabupaten Gunungkidul, semua responden petani tidak mempunyai irigasi dan semua merupakan sawah tadah hujan.

### **Dampak Pertanian Lahan Pantai Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Pasal 1 butir 20 Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan, bahwa "dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan". Pada dasarnya setiap usaha dan/atau kegiatan pembangunan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dampak tersebut dapat bersifat positif berupa manfaat dan dapat bersifat negatif berupa risiko terhadap lingkungan fisik maupun nonfisik termasuk kondisi sosial masyarakat (Otto Soemarwoto, 1989: 147). Pertanian lahan pantai yang dilaksanakan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dampak terhadap lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

#### **Dampak terhadap lingkungan fisik**

Dengan dimanfaatkannya lahan pantai untuk pertanian maka akan

banyak ditanam pohon-pohon besar sebagai penahan angin (*wind breaker*) untuk menunjang keberhasilan pertanian tersebut. Hal ini membawa dampak positif bagi lingkungan yaitu semakin meningkatnya penghijauan. Dengan semakin banyaknya penanaman pohon-pohon besar sebagai *wind breaker* sangat baik untuk menjaga kelestarian lingkungan di wilayah pantai, karena dengan akar-akar yang kuat dari pohon-pohon penahan angin tersebut akan mencegah terjadinya erosi di lahan pantai tersebut. Di sisi lain, akibat pertanian lahan pantai kemungkinan bisa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yaitu terjadinya perembesan (intrusi) air laut ke darat sehingga air di darat menjadi asin, apabila dalam pengelolaan pengairannya tidak memperhatikan masalah lingkungan. Pemanfaatan air tanah yang berlebihan di lahan pantai akan menyebabkan terjadinya perembesan (intrusi) air laut ke darat. Di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul telah diupayakan sistem pengairan yang ramah lingkungan (bebas dari intrusi air laut) yaitu penyediaan air dengan model embung/*reservoir*, tetapi model ini belum bisa menjangkau semua kawasan pertanian lahan pantai. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian luas lahan yang telah diusahakan 1492 ha, tetapi yang bisa dijangkau embung/*reservoir* baru 60 ha. Sisa lahan yang luasnya 1432 ha masih menggunakan sumur tanah untuk mengairi/menyiram lahan pertaniannya. Bisa disimpulkan bahwa pemanfaatan air (sumur) tanah masih tinggi di kawasan pertanian lahan pantai, sehingga berpotensi besar menyebabkan terjadinya intrusi air laut.

### Dampak terhadap kondisi sosial masyarakat

Keberhasilan petani menemukan jenis tanaman yang cocok untuk kondisi tanah berpasir menjadikan pertanian lahan pantai merupakan alternatif tambahan penghasilan selain pertanian di lahan biasa. Dampak positif lain dari pertanian lahan pantai adalah semakin tingginya tingkat kegotongroyongan dari para petani, mulai dari penanaman, kerjasama dalam mengairi pertanian sampai memasarkan hasil pertanian dilakukan bersama-sama, sehingga hubungan antara petani semakin guyup. Selain itu, pertanian lahan pantai juga menimbulkan dampak negatif yaitu adanya pengaplingan tanah *Sultan Grond* (SG)/*Paku Alam Grond* (PAG)/tanah negara secara bebas dan menganggap bahwa tanah yang digarapnya adalah miliknya sendiri. Dalam hal ini tidak ada kejelasan status dalam pemanfaatan tanah tersebut. Dari responden petani sebanyak 125 orang di Kabupaten Kulon Progo, ada 108 orang (86,4%) menggarap lahan PAG, 9 orang (7,2%) menggarap tanah negara, dan 8 orang (6,4%) menggarap lahan yang berstatus hak milik. Dari responden

petani sebanyak 100 orang di Kabupaten Bantul, ada 66 orang (66%) menggarap lahan SG, 16% menggarap hak milik, 6% menggarap tanah negara, dan 12% menggarap wedi kengser. Dari responden sebanyak 65 orang petani di Kabupaten Gunungkidul, ada 39 orang (60,%) menggarap lahan hak milik, 25 orang (38,5%) menggarap lahan SG, 1 orang (1,5%) menggarap tanah negara.

Luas yang digarap petani pun berbeda-beda. Dari responden petani sebanyak 125 orang di Kabupaten Kulon Progo, ada 35 orang (28%) menggarap lahan kurang dari 1000 m<sup>2</sup>, ada 36 orang (28,8%) menggarap lahan yang luasnya antara 1001-2000 m<sup>2</sup>, 54 orang ((43,2%) menggarap lahan yang luasnya lebih dari 2000 m<sup>2</sup>. Dari responden petani sebanyak 100 orang di Kabupaten Bantul, ada 52 % menggarap lahan kurang dari 1000 m<sup>2</sup>, sebanyak 30% menggarap lahan yang luasnya 1001- 2000 m<sup>2</sup>, sebanyak 18% menggarap lahan yang luasnya lebih dari 2000 m<sup>2</sup>. Dari responden sebanyak 65 orang petani di Kabupaten Gunungkidul, ada 37 orang ( 56,9%) menggarap lahan kurang dari 1000 m<sup>2</sup>, ada 17 orang (26%) menggarap lahan yang luasnya antara 1001-2000 m<sup>2</sup>, 11 orang (16,9%) menggarap lahan yang luasnya lebih dari 2000 m<sup>2</sup>. Perbedaan luas lahan yang digarap petani menyebabkan petani yang lahannya sempit berusaha memperluas lahan pertaniannya sampai ke kawasan lindung sempadan pantai.

### **Penyelenggaraan Pertanian Lahan Pantai Dikaitkan dengan Program Pantai Lestari**

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kelestarian kawasan pantai maka dikeluarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-45/MENLH/11/1996 tentang Program Pantai Lestari yang ditetapkan pada tanggal 19 November 1996. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang masuk dalam Program Pantai Lestari berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-56/MENLH/12/ 1997.

Pasal 2 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-45/MENLH/11/1996 menyatakan bahwa:

Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan wilayah pantai.

Pasal 4 menyatakan, bahwa Program Pantai Lestari bertujuan:

- a. terkendalinya pencemaran atau kerusakan lingkungan wilayah pantai dari berbagai usaha atau kegiatan;
- b. tercapainya masyarakat sadar lingkungan dan peningkatan peran

- serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan wilayah pantai;
- c. terbinanya hubungan koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait dalam pengelolaan lingkungan wilayah pantai.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kegiatan pertanian lahan pantai harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah pantai.

Pertanian lahan pantai yang diselenggarakan di Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta sejauh ini belum menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah pantai. Kegiatan pertanian lahan pantai justru mendukung pelaksanaan Program Pantai Lestari yaitu penghijauan di kawasan sepanjang pantai, karena pertanian lahan pantai berhasil apabila ada tanaman pematah angin (*wind barrier/wind breaker*), sehingga petani dengan penuh kesadaran menjaga penghijauan yang sudah dilakukan dengan baik sebelumnya dan menanam dengan tanaman keras bagi tempat-tempat yang masih gersang. Adanya dampak negatif belum dirasakan, tetapi melihat dalam hal pemanfaatan air tanah yang masih tinggi dalam jangka panjang dikuatirkan akan terjadi intrusi air laut. Dalam hal pemupukan dan pemberantasan hama masih menggunakan bahan-bahan kimia yang ada kemungkinannya berpengaruh terhadap kelangsungan flora dan fauna di kawasan pantai, sehingga perlu ada kajian yang lebih mendalam mengenai pengaruh residu pupuk kimia dan pestisida terhadap kelangsungan makhluk hidup lain.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian kawasan pantai, Kementrian Lingkungan Hidup mencanangkan Program Pantai Dan Laut Lestari. Program Pantai dan Laut Lestari merupakan program pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu. Propinsi DIY dan Kabupaten Bantul sudah dimasukkan dalam Program Pantai dan Laut Lestari. Kabupaten Bantul menindaklanjutinya dengan membentuk tim teknis koordinasi pengelolaan pesisir secara terpadu dengan SK Bupati Bantul Nomor 409 tahun 2002 Tentang Pembentukan Tim Teknis Koordinasi Pantai Bersih Dan Laut Lestari Kabupaten Bantul, sedangkan Propinsi DIY masih dalam proses pembentukan tim teknis pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.

Kawasan pantai Kabupaten Kulon Progo banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti wisata, perikanan, peternakan, pertanian, dan transmigrasi, sehingga berpotensi sekali untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan kawasan pantai. Demikian juga dengan Kabupaten Gunungkidul, kawasan pantai banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Oleh karena itu perlu sekali Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul diikutsertakan dalam Program Pantai Dan Laut Lestari



(program pengelolaan wilayah pantai secara terpadu). Dimasukkannya Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul dalam Program Pantai dan Laut Lestari diharapkan semua kegiatan yang dilakukan di kawasan pantai dapat dikaji dampaknya terhadap lingkungan dan rencana pengelolaannya lebih lanjut, termasuk dalam hal ini kegiatan pertanian lahan pantai dapat dikaji dampaknya terhadap lingkungan secara mendalam baik dari segi pengolahan tanahnya, pemupukan, pemberantasan hama, pengairan dan rencana pengelolaannya lebih lanjut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Upaya Pemerintah Daerah adalah menetapkan kebijakan mengenai pemanfaatan lahan pantai yang dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai Selatan (RDTRK). RTRW maupun dalam RDTRK tidak memberikan kejelasan apakah kegiatan pertanian lahan pantai boleh dilakukan di kawasan sempadan pantai atau tidak. Ketidakjelasan ini menyebabkan pejabat pemerintah tidak mempunyai sikap dan tindakan yang tegas terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan pertanian di kawasan sempadan pantai. Di lain pihak masyarakat sendiri kurang mengetahui mengenai kawasan lindung dan kawasan budidaya yang ada di wilayah pantai. Upaya lain yang dilakukan adalah mengembangkan sistem irigasi yang ramah lingkungan yaitu penyediaan air dengan model embung/reservoir yang disedot dari sungai atau saluran drainase.
2. Pertanian lahan pantai yang dilaksanakan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dampak terhadap lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Dampak positif terhadap lingkungan fisik adalah semakin meningkatnya penghijauan di kawasan pantai, karena banyak ditanam tanaman penahan angin (*wind barrier/wind breaker*) untuk melindungi angin laut yang membawa air garam yang merusak tanaman. Dampak negatifnya adalah kemungkinan terjadinya intrusi air laut karena pemanfaatan air (sumur) tanah yang masih tinggi. Dampak positif terhadap kondisi sosial masyarakat adalah semakin meningkatnya pendapatan masyarakat, sedangkan dampak negatifnya adalah pengaplikan tanah secara bebas.
3. Penyelenggaraan kegiatan pertanian lahan pantai di satu sisi mendukung pelaksanaan Program Pantai Lestari di Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta yaitu penghijauan di kawasan sepanjang pantai, tetapi di sisi lain belum ada kajian secara mendalam ditinjau dari aspek lingkungannya. Kawasan pantai selatan di Propinsi DIY banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, sehingga perlu ikut dan aktif dalam Program Pantai Dan Laut Lestari (program pengelolaan wilayah pantai secara terpadu) agar semua kegiatan yang dilakukan di kawasan pantai khususnya pertanian dapat dikaji secara mendalam dari aspek lingkungannya.

### Saran

1. Pemerintah perlu memperhatikan dan melaksanakan rekomendasi yang berkaitan dengan kajian aspek lingkungan dalam Design Model Optimalisasi Pengembangan Lahan Pantai DIY hasil kerjasama antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi DIY dengan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
2. Perlunya dilaksanakannya sosialisasi mengenai dampak pertanian lahan pantai terhadap masyarakat dan sosialisasi konservasi sempadan pantai.
3. Pemberian kejelasan status penguasaan tanah lahan pantai untuk menghindari anggapan negatif terhadap penguasaan tanah tersebut untuk menghindari konflik kepentingan.
4. Perlu adanya ketentuan yang jelas mengenai pengelolaan kawasan lindung sempadan pantai.
5. Perlu adanya peraturan mengenai teknis pelaksanaan pertanian lahan pantai khususnya pemanfaatan air tanah, sehingga tidak terjadi pemanfaatan air tanah yang berlebihan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Istiyanti, Eni, 1999, "Peluang Ekonomi Pengembangan Usaha Tani Di Lahan Pantai", Disampaikan pada *Seminar PERHEPI Wilayah DIY* Tanggal 3 Agustus 1999.
- Soemarwoto, Otto, 1997, *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Cetakan Ketujuh, Djambatan, Jakarta.
- Wibawanti, Sri, Erna, 2001, "Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan Di Kabupaten Bantul", *Tesis, Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.